

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA SORONG

**Martha Marice Koibur
Sifrid Pangemanan
Harijanto Sabijono**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi**

Email : Koiburmartha@gmail.com

ABSTRAK

Granting regional autonomy is intended to improve the effectiveness and efficiency of government administration in order to manage and take care of its own country, especially in development finance. Local Revenue (PAD) are all local revenues derived from economic resources native to the area, and one of the sources of revenue that have the largest contribution coming from the Regional Tax and Retribution. Local Taxes and Levies is one form of public participation in the implementation of otonomi area . local Taxes and levies a local revenue sources that are essential to finance the implementation of government and regional development. the aim of this study was to determine Contributions of local Taxes to PAD in Sorong. this research uses primer method. data analysis techniques used through the analysis of the percentage contribution. Based on the survey results revealed that in 2011 to 2014 local taxes was a contributing factor to the PAD. in the reception area is the largest tax contribution occurred in 2012 by 49%, while the lowest tax revenue occurred in 2010, namely 18%. And the contribution of each type of local tax receipts largest occurred in 2012 which amounted to 20,07% BPHTB tax and revenue realization is kind of the lowest tax registration tax perus.perdagangan is 0,25%

Keywords: Local Taxes and Local Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Namun sumber penerimaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber dana utama dan sangat potensial dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009 1). Pendapatan Pajak Daerah, meliputi : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan Lain lain pendapatan daerah yang sah. 2).Dalam perimbangan. 3), dan Pinjaman daerah. 4). Lain lain pendaptan daerah yang sah.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Kota Sorong ?

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Akuntansi

Reeve, Warren, dan Duchac (2012), mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pengguna tentang kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis. Disamping itu, akuntansi memberikan informasi kepada pengguna lain dalam menilai kinerja ekonomi dan kondisi bisnis. Dengan demikian, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan kepada pengguna tentang kegiatan karena akuntansi adalah sarana.

Konsep Akuntansi Pajak

Muljono (2010), mendefinisikan pajak sebagai suatu pengalihan sumber- sumber yang wajib dilakukan dari sector swasta kepada sector pemerintah berdasarkan peraturan tanpa suatu imbalan kembali dan langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam menjalankan pemerintahan (Tarida, 2014:698). Menurut Cnossen, Apabila suatu negara secara nasional mempunyai pembukuan yang kurang baik, maka akibatnya negara itu akan mengalami kesulitan dalam menyusun sistem perpajakan yang baik (Waluyo 2012:38).

Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa Akuntansi pajak dapat didefinisikan sebagai sistem akuntansi yang mengkalkulasi, menangani, mencatat, bahkan menganalisa dan membuat strategi perpajakan sehubungan dengan kejadian-kejadian ekonomi transaksi perusahaan. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsinya, mengelolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang membuat perhitungan perpajakan.

Konsep Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Definisi – definisi tersebut diantaranya sebagai berikut.

1. Menurut Soemitro dalam Muljono (2010:1), pengertian pajak adalah sebagai berikut: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut Soemitro, dikutip oleh mardiasmo (2016 : 1), menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak

Fungsi utama dari system pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan yang cukup untuk membiayai pengeluaran penting pada barang dan jasa yang di sediakan oleh pemerintah. Jika suatu Negara ingin mengembangkan, membutuhkan untuk mengumpulkan penerimaan pajak jumlah

yang lebih besar dari 10-15 persen ditemukan di banyak Negara berkembang. Pajak merupakan salah satu instrumen terbaik untuk meningkatkan potensi (Pius, 2014 : 449).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya PAD yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Semakin besar PAD yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Sekayu, 2013:138).

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sebelumnya kurang mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas.

Pajak Daerah

Menurut mardiasmo (2011), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konsep Kontribusi

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama oleh pihak lain, untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama, sehingga kontribusi disini bisa diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap besarnya belanja pembangunan daerah (Tumurang : 2011,22).

Penelitian Terdahulu

Tumurang (2011) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan. Letak kesamaan pada dengan penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang pajak daerah, tetapi dalam penelitian ini tidak hanya membahas tentang pajak daerah tetapi ada juga 11 pajak yang lainnya.

Metode Penelitian

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan data kuantitatif berupa Daftar Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Sorong . Di sisi lain, data kualitatif berupa struktur organisasi, tugas, dan kepegawaian dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong, yaitu data berupa jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota

Sorong tahun 2010 – 2014 berupa data kuantitatif yang kemudian dijadikan data kualitatif dengan mendeskripsikan angka – angka tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Data Kualitatif yaitu jumlah PAD Kota Sorong dari tahun 2010-2014 yang kemudian di jadikan Data Kualitatif yaitu dengan mendeskriptifkan angka-angka . Dalam studi lapangan ini penelitian dapat di lakukan dengan cara wawancara langsung yaitu dengan percakapan langsung serta Tanya jawab dengan pihak Dinas Pendapatan Kota Sorong dan mendapatkan data berupa Daftar Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Sorong.

Definisi Operasional

1. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah yang dimaksudkan oleh peneliti adalah penerimaan Pajak daerah yang ada di Kota Sorong. Variabel ini diukur dari jumlah penerimaan Pajak Daerah dalam satuan Rupiah.
2. Pendapatan Asli Daerah yang dimaksudkan oleh peneliti adalah Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Sorong, yang terdiri dari Pajak Daerah. Variabel ini diukur dari jumlah Pendapatan Asli Daerah dalam satuan Rupiah. (Landjang : 2011)

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Peneliti mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan judul skripsi seperti tabel realisasi penerimaan PAD.
2. Memperoleh gambaran umum dari objek penelitian secara keseluruhan serta mengetahui permasalahan yang ada.
3. Mengolah data yang ada.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan rumus sebagai berikut.

$$\frac{X}{Y}$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Y = Realisasi Penerimaan PAD

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sekilas Kota Sorong

Secara geografis, Kota Sorong berada pada koordinat 131°51' Bujur Timur dan 0° 54' Lintang Selatan, memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Distrik Makbon (Kabupaten Sorong) dan Selat Dampir
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Selat Dampir
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Distrik Makbon (Kabupaten Sorong) dan Selat Dampir
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Distrik Aimas (Kabupaten Sorong) dan Distrik Salawati (Kabupaten Raja Ampat)

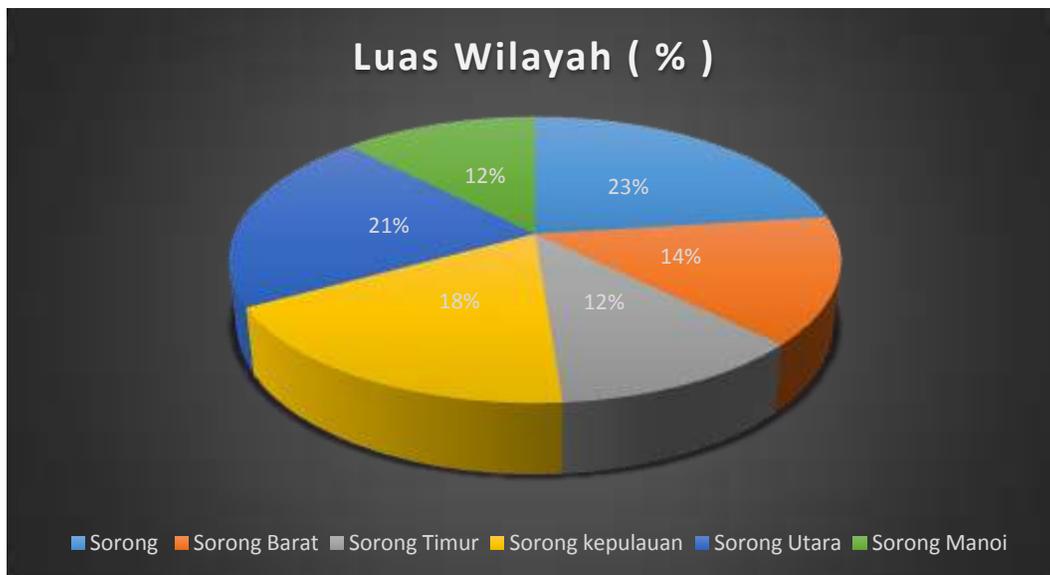
Luas wilayah Kota Sorong mencapai 1.105,00 km², atau sekitar 1.13% dari total luas wilayah Papua Barat. Wilayah kota ini berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan suhu udara minimum di Kota Sorong sekitar 23, 1 ° C dan suhu udara maximum sekitar 33, 7 ° C. Secara Administratif Kota Sorong terbagi kedalam enam wilayah kecamatan dan tiga puluh satu kelurahan.

Tabel 4.1
Pembagian Wilayah Kota Sorong

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kelurahan
1	Sorong	126,85	5
2	Sorong Barat	254,15	5
3	Sorong Timur	158,22	7
4	Sorong Kepulauan	200,10	4
5	Sorong Utara	229,71	5
6	Sorong Manoi	135,97	5
Jumlah		1.105,00	31

Sumber data : Bps Kota Sorong

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada gambar dibawah ini sebagai berikut.



Kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu kecamatan yang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Kemudian menjadi Kota Administratif Sorong berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1996 tanggal 3 Juni 1996. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999

Kota Administratif Sorong ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom Kota Sorong. Pada tanggal 12 Oktober 1999 bertempat di Jakarta dilaksanakan pelantikan Pejabat Walikota Sorong Drs. J. A. Jumame, kemudian pada tanggal 28 Februari 2000, secara resmi Kota Sorong terpisah dari Kabupaten Sorong.

Hasil Penelitian

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Sorong

Tabel 4.2
Target Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Sorong
Tahun 2010-2014

No	Tahun	Target	Realisasi	Selisih (Rp)
1	2010	3.160.000.000	4.513.840.772	1.353.840.772
2	2011	8.050.000.000	9.259.567.134	1.209.567.134
3	2012	9.020.000.000	11.493.050.866	2.473.050.866
4	2013	7.500.000.000	14.244.736.024	6.744.736.024
5	2014	24.750.000.000	26.082.507.855	1.332.507.855

Sumber data diolah.

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa pajak daerah pada tiap tahunnya selalu memenuhi target. Pada tahun 2013 terdapat selisih Rp.6.744.736.024 yang merupakan selisih tertinggi, dari target yang ditentukan sebesar Rp.7.500.000.000 dengan realisasi sebesar 14.244.736.024 dan tahun 2011 terdapat selisih Rp. 1.209.567.134 yang merupakan selisih terendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8.050.000.000 dengan realisasi yang di dapat sebesar Rp. 9.259.567.134. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2014 rata-rata terjadi peningkatan selisih antara target dengan realisasi pajak daerah.

Tabel 4.3
Target Anggaran dan Realisasi PAD Kota Sorong
Tahun 2010-2014

No	Tahun	Target	Realisasi	Selisih (Rp)
1	2010	17.607.000.000	25.709.752.924	8.102.752.924
2	2011	26.403.000.000	25.238.601.351	-1.164.398.649
3	2012	20.692.700.000	24.401.094.465	3.708.394.465
4	2013	22.984.990.000	85.825.752.494	62.840.762.494
5	2014	87.804.850.000	26.082.507.855	-61.722.342.145

Sumber data diolah.

Pada tabel 4.3 terlihat bahwa PAD di Kota Sorong tiap tahunnya selalu memenuhi target yang ditentukan. Namun Pada tahun 2011 PAD yang ditargetkan tidak memenuhi syarat dengan selisih sebesar Rp. -1.164.398 dari target yang ditentukan sebesar Rp. 26.403.000.000 sedangkan yang terealisasi adalah Rp.25.236.601.351, yang merupakan selisih terendah. Dan pada tahun 2014 PAD yang ditargetkan juga

tidak memenuhi target dengan selisih sebesar Rp. -61.722.342.145 yang merupakan selisih terbesar. dan realisasi PAD yang memenuhi target terjadi pada tahun 2013 sebesar Rp.85.825.752.494 dengan selisih Rp.62.840.762.494, dari targetkan yang ditentu merupakan PAD terbesar.

Begitupun dengan tahun 2010 dengan target 17.607.000.000 dengan realiasi sebesar Rp.25.709.752.924, dan di tahun 2012 PAD juga memenuhi target dengan selisih sebesar Rp. 3.708.394.465.

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi setiap jenis Pajak Daerah terhadap PAD, pada umumnya persentase kontribusi dari setiap jenis Pajak Daerah terhadap PAD berfluktuasi. Pajak hotel kontribusinya terhadap PAD mengalami penurunan pada tahun 2013 yaitu 1.48 % dari 2.52 % pada tahun sebelumnya. Pajak restoran kontribusinya terhadap PAD mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu 3.50 % dari tahun sebelumnya 3.81 %. Pajak hiburan memberikan kontribusi 0,50 % pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 10.4 %. Pajak reklame, juga mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2011 dan tahun 2012 dari tahun sebelumnya yaitu 2.59 % dan 3.71 % dari 3.16 %. Pajak penerangan jalan umum memberikan kontribusi paling rendah pada tahun 2014 yaitu 5.50 % dan memberikan kontribusi tertinggi pada tahun 2012 sebesar 12.48 %. Pajak bahan galian tidak memberikan kontribusi selama dua tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014 dan memberikan kontribusi terendah pada tahun 2010 yaitu 0.34 % dan memberikan kontribusi tertinggi yaitu 0.73 %, seperti pajak penerangan jalan, pajak radio, pajak bangsa asing , pajak perusahaan dagang dan pajak industry & jasa juga tidak memberikan memberikan kontribusi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, sedangkan pajak BPHTB memberikan kontribusi terendah pada tahun 2014 yaitu 5.71 % dan pajak kontribusi BPHTB tertinggi pada tahun 2012 yaitu 20.7 % dan tidak memberikan kontribusi pada tahun 2010. Pajak PBB-P2 memberikan kontribusi sebesar 8.67 % sedangkan empat tahun sebelumnya pajak PBB-P2 tidak memberikan kontribusi.

Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, kontribusi setiap jenis pajak paling tinggi terjadi pada tahun 2012. Dari semua jenis pajak daerah yang ada, pajak BPHTB memiliki persentase kontribusi sebesar 20.07 %. Sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada 2010 yaitu pajak pendaftaran perus.perdagangan dengan persentase kontribusinya hanya 0.25 %. Pada tahun 2010 sampai dengan 2014 baik pajak daerah maupun PAD menunjukkan perubahan di setiap penerimaan tiap tahun.

Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data PAD untuk tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 (tabel 4.1 dan tabel 4.2), dapat dilakukan analisis besarnya Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Sorong sebagai berikut.

—

Tabel 4.4
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD
Tahun 2010-2014

Tahun	Target	Realisasi	PAD	Persentase
2010	3,160,000,000	4,513,840,772	25,709,752,924	18 %
2011	8,050,000,000	9,259,567,134	25,238,601,351	37%
2012	9,020,000,000	11,493,050,866	24,401,094,465	49 %
2013	7,500,000,000	14,244,736,024	56,766,449,295	25,10 %
2014	24,750,000,000	26,082,507,855	85,825,752,494	30,40 %

Sumber Data diolah.

Pada tabel 4.4 mengenai target dan realisasi pajak daerah diketahui bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 pajak daerah selalu mengalami peningkatan dalam realisasinya. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 penerimaan pajak daerah sudah memenuhi target yang di tetapkan. Pada tahun 2010, dapat di lihat bahwa tingkat persentase mencapai 18% yaitu realisasi pajak daerah mencapai Rp.4.513,840,772 dari target yang di tetapkan yaitu Rp.3,160,000,000 sehingga dapat diketahui bahwa realisasi Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.1,353,840,772.

Pada tahun 2011, dapat di lihat bahwa tingkat persentase mencapai 37 % yaitu realisasi pajak daerah mencapai Rp.9,259,567,134 dari target yang ditetapkan yaitu Rp.8,050,000,000 sehingga dapat diketahui bahwa realisasi pajak pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp.1,209,567,134. Hal menunjukkan bahwa wajib pajak semakin baik dalam membayar pajak. Pada tahun 2012, dapat dilihat bahwa tingkat persentase mencapai 49% yaitu realisasi Pajak Daerah mencapai Rp.11,493,050,866 dari target yang ditetapkan yaitu Rp.9,020,000,000 sehingga dapat di ketahui bahwa realisasi pajak daerah pada tahun 2012 terus menunjukkan peningkatan sebesar Rp.2,473,050,866.

Pada tahun 2013, dapat dilihat bahwa tingkat persentase mengalami penurunan sebesar 25,10% yaitu realisasi pajak daerah sebesar Rp. 14,244,736,024 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 7,500,000,000. Dan pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah sudah memenuhi target yang ditetapkan dengan tingkat persentase mencapai 30,40% yaitu realisasi pajak daerah mencapai Rp.26,082,507,855 dari target yang di tetapkan yaitu Rp.24,750,000,000. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak yang semakin tepat membayar pajak dan juga usaha dari pemerintah setempat melalui petugas – petugas kantor dispenda kota sorong.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pajak Daerah memberikan penerimaan kontribusi terbesar pada tahun 2012 sebesar 49 %, Sedangkan penerimaan pajak terendah pada tahun 2010 yaitu 18 %.
2. Dari tahun 2010 sampai dengan 2014, realisasi penerimaan terbesar pada jenis pajak daerah terjadi pada tahun 2012 yaitu pajak BPHTB sebesar 20.07 % dan realisasi penerimaan terendah pajak pendaftaran perus. Perdagangan yaitu 0.25 %
3. Dari tahun 2010 sampai dengan 2014, realisasi penerimaan PAD tidak mencapai 100 % sesuai dengan PAD yang sudah di targetkan.
4. Tinggi atau rendahnya kontribusi dari setiap pajak daerah yang ada dipengaruhi oleh banyak sedikitnya penyelenggaraan yang terjadi atas setiap jenis pajak tersebut.

Saran

Dalam hubungan dengan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut.

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong hendaknya meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku.
2. Serta Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong hendaknya dapat meningkatkan kualitas kinerja.
3. Lewat Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Sorong untuk dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kota Sorong.

DAFTAR PUSTAKA

- Boby Rantow Payu, 2014 Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi/Volume XVIII, No.01, Januari 2014: 141-150*
<http://www.google.com> : PERDA Kota Sorong No 1 Tahun 2011
- Kieso weygant warfield 2011 Intermediate volume 1 IFRS edition WileyMardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi. Yogyakarta.
- Mohamad Riduansyah, 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah. (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode 1993/1994-2004)
- Nancy Irma Landjang, 2011 Analisis kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. *Skripsi (tidak di publikasi)* Fakultas Ekonomi dan Unsrat Manado
- Novita Synthia Tumurang, 2011 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Selatan. *Skripsi (Tidak di publikasi)* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat Manado.
- Neringa Slavinskaitė 2013 Development Of Local Municipality Taxes and Principles of Fiscal Policy in Lithuania. *American International Journal of Contemporary Research, Vol.3 No.8 August 2013*
- Pius V. C. Okoye 2014 The Impact of E-Taxation on revenue Generation in Enugu, Nigeria. *Internasional Journal Of Advance Research (2014), Volume 2, Issue 2, 449-458*
- Randy J.R. Walakandou 2013 Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. *Skripsi (Tidak di publikasi)* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat Manado.
- Rahmaniyah Sekayu, 2013. Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten musi banyuasin. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius) Vol.3 No.2 Mei 2013*
- Reeve, Warren dan Duchac 2012, *Principle Accounting 23e*
- Skousen Langenderfer Alberth 2009, *Accounting Principle and Applications*
- Tarida Elisa Butarbutar, Analisa peranan Pajak Parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tomohon lisatar.It@gmail.com. *Jurnal Emba Vol.2 No.4 2014, Ha. 697-704*
- Waluyo 2012, *Akuntansi Pajak Edisi 4 Penerbit Salemba Empat*
- Winda Ayu Mustika 2014, Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. *Vol 3 No 6 (2014)*
- _____. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.